

**PENGARUH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA  
(Studi pada Suku Kamoro di Kabupaten Mimika)<sup>1</sup>**

Mohammad Mulyadi<sup>2</sup>

*Abstract*

*The subject of this research is poverty alleviation in Mimika regency in Papua Province. The researcher attempted to examine how far empowerment program introduced by the central government could be successful in improving people's welfare. Data was collected by conducting survey, and quantitative method was used as a tool of analysis. The research focused on empowerment program offered to Kamoro tribe.*

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan, Suku Kamoro

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama, tetapi masih menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan 1997 telah mempengaruhi sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat luas. Krisis ini telah mengakibatkan berbagai dampak sosial pada semua strata masyarakat, seperti terjadinya kesenjangan yang semakin tajam antara kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok dengan daya beli masyarakat, kesenjangan antar-golongan yang melebar dan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas, gangguan keamanan serta pengangguran. Selain itu musibah yang seolah tidak pernah

---

<sup>1</sup> Tulisan ini adalah hasil penelitian pada tahun 2008

<sup>2</sup> Penulis adalah Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI. Alamat e-mail : mohammadmulyadi@yahoo.co.id

berhenti, seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, semburan lumpur panas), berbagai kecelakaan di bidang transportasi yang telah menyita biaya sosial tinggi, ternyata secara langsung maupun tidak langsung telah ikut menambah angka kemiskinan. Akumulasi dari berbagai bentuk krisis membuat masyarakat frustrasi dan kepercayaan kepada pemerintah semakin merosot, sedangkan ketidakpastian mengenai kapan semua ini akan berakhir juga terus menghantui masyarakat.

Strategi pembangunan di Indonesia terfokus pada industrialisasi yang padat modal, sedangkan sektor pertanian dan pedesaan terlupakan, sehingga mengakibatkan berkurangnya persediaan beras dalam negeri, yang kemudian diikuti oleh kebijakan yang kontroversial yaitu impor beras. Kebijakan menggalakkan investasi yang diharapkan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja tidak diimbangi dengan iklim investasi yang memadai berakibat pada tingginya tingkat pengangguran yang pada akhirnya akan menambah angka kemiskinan. Demikian pula kebijakan perbankan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, merupakan hambatan dalam memacu kesempatan berusaha bagi kelompok ekonomi lemah, tetapi lebih cenderung berpihak pada konglomerat.

Di sinilah peran pemerintah amat diperlukan, sehingga solusi yang harus dijalankan, setidaknya-tidaknya ada dua yaitu, *pertama* memperbaiki kinerja aparatnya serta memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme ditubuh birokrasi. Seringkali macetnya program penanggulangan kemiskinan disebabkan karena tidak responsifnya aparat dalam menangani rintangan di lapangan. Terhambatnya program pemberdayaan juga kerap disebabkan oleh birokrasi yang korup sehingga menciptakan ekonomi biaya tinggi yang tidak akan mampu dipenuhi oleh para pengusaha miskin yang sedang merintis usahanya. *Kedua*, menjalankan program penanggulangan kemiskinan dengan paradigma menjadikan orang miskin sebagai mitra. Program ini mencakup pelibatan masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang cara pandang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perubahan dalam cara pandang ini diharapkan tidak saja akan membuat pemerintah mengkaji pendekatan dalam mengatasi kemiskinan, namun juga mengubah paradigma dalam melibatkan mereka yang tertinggal dalam pembangunan.

Salah satu masalah pemberdayaan masyarakat yang selama ini terjadi di Mimika adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tidak melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada para pelaku nonpemerintah untuk terlibat. Pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat dimaksudkan hanya untuk mendistribusikan kebijakan, program maupun pelayanan yang berasal dari pemerintah saja dan tidak diupayakan untuk memobilisasi potensi-potensi yang ada di masyarakat. Monopoli pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menjadi alat untuk memperluas cakupan dominasinya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat.

Di Kabupaten Mimika terdapat dua suku besar yang menjadi penduduk asli Mimika, yaitu Amungme dan Kamoro ditambah lima suku kekerabatan yang lain yaitu Dani, Damal, Moni, Ekari, dan Nduga. Penelitian ini mengangkat persoalan penanggulangan kemiskinan di Suku Kamoro saja, karena Suku Kamoro yang banyak mendiami wilayah Timika, yaitu wilayah ibukota Kabupaten Mimika. Dari studi pendahuluan yang dilakukan, diketahui prioritas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Suku Kamoro tidak mencakup rencana pemberdayaan masyarakat yang berasal dari aspirasi masyarakat, tetapi berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Distrik, Kepala kampung dan Kepala Suku. Proses perencanaan yang dilaksanakan secara tertutup, dimana masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk terlibat di dalamnya menyebabkan perencanaan menjadi alat untuk mengimplementasikan agenda-agenda elite pemerintah atau suku. Pengambilan keputusan dalam proses perencanaan sangat diwarnai oleh kultur paternalistik, dimana Kepala Distrik, Kepala kampung dan Kepala Suku adalah penentu segalanya.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang tidak melibatkan masyarakat itu belum sepenuhnya memahami arti penting dari keterlibatan masyarakat. Dominasi campur tangan 'kekuasaan' yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat masih menjiwai sikap dan perilaku masyarakat untuk tidak ikut serta dalam setiap tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Masalah kemiskinan ini semakin menarik untuk diteliti secara ilmiah, karena angka kemiskinan merupakan suatu indikator keberhasilan atau kegagalan suatu sistem pemerintahan dalam usaha mensejahterakan rakyat. Sehingga setiap kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam kaitannya dengan usaha penanggulangan kemiskinan, sangat memerlukan analisis perencanaan dan pelaksanaan yang tepat.

Berkaitan dengan hal itu Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, terutama sumber daya finansial yang diperoleh dari bagi hasil tambang emas PT. Freeport, tentu akan sangat memberi peluang bagi tercapainya pengentasan kemiskinan secara

bertahap dan berkesinambungan terutama bagi suku Kamoro sebagai suku asli di Mimika. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, terkait dengan bagi hasil. Pemerintah Provinsi Papua ditegaskan mendapatkan bagian sebesar 80 persen dari hasil pendapatan yang diserahkan kepada negara dari PT. Freeport.<sup>3</sup> Dari jumlah ini tersebut, akan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi sebesar 16 persen, 32 persen untuk daerah penghasil yaitu Kabupaten Mimika dan 32 persen sisanya akan dibagikan secara merata bagi seluruh kabupaten di Papua. Dengan demikian, peluang terhadap penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berhasil, karena Pemerintah Kabupaten Mimika mendapatkan support dana dari bagi hasil pertambangan, khususnya pertambangan yang dikelola oleh PT. Freeport.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, diketahui bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan akan sangat bergantung pada sejauh mana program pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu masalah penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : "Seberapa besar pengaruh kebijakan pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan Suku Kamoro di Kabupaten Mimika ?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan pemerintah. Terdapat anggapan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan selama ini, masih belum memperlihatkan hasil yang nyata, karena masih ditemukan banyak masyarakat yang berada digaris kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan besarnya pengaruh program pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan pada Suku Kamoro di Kabupaten Mimika.

---

<sup>3</sup> Pasal 14 UU. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Konsep Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat, merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang menekankan pada pemberdayaan dengan menciptakan kemandirian masyarakat. Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Pengertian pemberdayaan identik dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia, yang tidak sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan, tetapi menekankan pentingnya kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia.<sup>4</sup>

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka atau proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, dengan demikian pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Berbagai definisi pemberdayaan di atas menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud meliputi:<sup>5</sup>

- a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

---

<sup>4</sup> Moeljarto Tjokrowinoto, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hal. 29.

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 58.

Beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik sehingga mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.

Sejalan dengan strategi penanggulangan kemiskinan, maka proses pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dilakukan secara komprehensif, karena pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan dengan cara memberdayakan komunitas itu sendiri.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan secara komprehensif adalah pemberdayaan yang mencakup bidang politik, ekonomi maupun sosial.<sup>7</sup> Karena itu untuk memberdayakan masyarakat miskin harus mencakup berbagai kegiatan dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan politik agar mereka dapat meningkatkan kekuatan, kemandirian dan peranan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan menuju kehidupan yang cerdas, maju adil, sejahtera dan aman. Upaya memberdayakan masyarakat miskin dilakukan dengan memperkuat potensi akses atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana ekonomi kerakyatan, baik fisik maupun sosial, yang dapat diakses oleh atau yang sangat akrab dengan masyarakat lapisan bawah. Dalam upaya memberdayakan masyarakat, strategi yang dilakukan adalah mendorong proses pembangunan di segala bidang melalui pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat dan mengupayakan arah pembangunan yang partisipatif. Dengan strategi ini diharapkan masyarakat dapat mandiri dalam proses pembangunan sosial-ekonomi, demi terciptanya ketahanan masyarakat, meminimalkan potensi konflik dan degradasi moral, serta mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Karena itu pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah

<sup>6</sup> Sriharini, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hal. 121.

<sup>7</sup> Suparjan dan Hemptri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2003, hal. 187.

penekanan pada pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.

Dikatakan sebagai tujuan karena pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian. Sehingga kemandirian di sini merupakan suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

## **2. Konsep Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum, bukan bersifat khusus pada masyarakat yang berlatar belakang, suku bangsa dan agama. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri, terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Kemiskinan suatu negara atau daerah tidak hanya dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, sikap hidup dan adat istiadat, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Kedua pendapat ini jelas memberikan gambaran bahwa kemiskinan ditimbulkan oleh berbagai faktor.

Akar penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan faktor alam, sumber-sumber daya yang langka dan akibat perkembangan teknologi yang rendah. Ini mempunyai pengertian faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan dalam sebuah masyarakat secara alami memang ada, tetapi dalam kategori kemiskinan yang seperti ini pada umumnya tidak mempunyai kesenjangan yang terlalu tinggi. *Kedua*, kemiskinan struktural atau kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan suatu sistem supra-struktur atau politik. Kebijakan telah membuat sekelompok masyarakat mendominasi penguasaan sarana ekonomi, sementara kelompok masyarakat lainnya tidak memiliki kesempatan. Pada kategori ini,

kesenjangan ekonomi masyarakat sangat tinggi antara yang miskin dan yang kaya.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah bentuk kemiskinan struktural atau buatan, karena secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat dari supra-struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta dipinggirkannya peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang terindikasi dengan melemahnya tingkat keswadayaan masyarakat.

Kemiskinan, pada kenyataannya, lebih dilihat dari sudut ekonomi semata. Batasan kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang tidak memiliki harta benda atau mempunyai pendapatan di bawah batasan nominal tertentu. Tingkatan kemiskinan dinilai atau ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran materi yang sudah didefinisikan sebelumnya, seperti: kondisi fisik dari bangunan atau lingkungan permukiman. Pengertian kemiskinan yang sangat ekonomistik dan sempit akan melahirkan bentuk-bentuk kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih merupakan 'bantuan' ekonomi saja. Pemahaman kemiskinan dalam arti yang lebih luas, atau sering didefinisikan sebagai kemiskinan majemuk, adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi atau esensial sebagai manusia.

Adapun tingkat kemiskinan dibedakan dalam dua kategori yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antar kelompok masyarakat yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pada garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang miskin karena mempunyai tingkat pendapatan relatif lebih rendah dari pada garis kemiskinan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Heru Nugroho, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 188.

Kemiskinan adalah kondisi yang disebabkan karena beberapa kekurangan dan kecacatan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis maupun kultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam kehidupannya. Selain itu, faktor struktural merupakan penyebab orang menjadi miskin. Seseorang yang berada di lingkungan masyarakat yang mempunyai karakteristik antara lain: distribusi penguasaan *resources* yang timpang, gagal dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, institusi sosial yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi. Berkaitan dengan fenomena kemiskinan di Indonesia, umumnya mereka yang tergolong miskin adalah kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah dan hidup di daerah pinggiran (*periphery*), sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh pendidikan layak. Kedua aspek itu melingkar-lingkar terus dan jarang bisa ditemukan titik pemberhentiannya, maka antara kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah merupakan faktor yang saling terkait yang bisa menjadi sebab dan akibat dari rendahnya produktivitas ekonomi. Keseluruhan konsep kemiskinan yang bersifat multidimensional menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu :<sup>9</sup>

1. ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. ketiadaan jaminan masa depan (karena tidanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun missal.
5. rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anal terlantar, wanita korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

---

<sup>9</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 7-8.

Problem kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus-menerus dan dicarikan solusinya. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan menjadi persoalan masyarakat, akan tetapi juga karena gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan, beragam kebijakan dan program telah disebar dan diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini, sehingga tidak sedikit jumlah dana yang telah dikeluarkan demi menanggulangi kemiskinan. Tak terhitung berapa kajian dan ulasan telah dilakukan di universitas, hotel berbintang, dan tempat lainnya. Pertanyaannya: mengapa kemiskinan masih menjadi bayangan buruk wajah kemanusiaan kita hingga saat ini?

Upaya penurunan derajat kemiskinan telah dilakukan selama tiga dekade di Indonesia, ternyata masih sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan mendasar dari penanggulangan kemiskinan, antara lain:<sup>10</sup>

1. masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro,
2. kebijakan yang terpusat,
3. lebih bersifat karikatif,
4. memposisikan masyarakat sebagai obyek,
5. cara pandang tentang kemiskinan,
6. asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang dianggap sama.

Dalam rangkaian program pembangunan di dalam menanggulangi masyarakat yang mengalami masalah sosial tersebut perlu dipahami berbagai hal yang berkaitan dengan seluk beluk permasalahannya. Bagi masalah kemiskinan yang akan ditampilkan dalam penelitian ini, semestinya perlu dipahami paling tidak kondisi, instensitas dan komplikasi yang terjadi di samping tentu saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah kemiskinan tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat miskin yang dibutuhkan bukan sekedar program yang sifatnya parsial, namun langkah-langkah yang terpadu dan benar-benar fungsional dalam mendukung upaya pemberdayaan penduduk miskin itu sendiri, khususnya di kalangan keluarga yang secara sosial rentan, dari segi kesehatan rapuh, dan yang memiliki akses teramat kecil di bidang pendidikan.

---

<sup>10</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Buku Panduan "Kebijakan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan"*, Jakarta, 2005, hal. 1-2.

Karakteristik utama dan penyebab utama kemiskinan pada wilayah miskin mencakup:<sup>11</sup> (1) sumber daya alam, (2) teknologi dan unsur pendukungnya, (3) sumber daya manusia, dan (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan. Adapun sasaran langkah-langkah penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari sumber-sumber penggerakannya melalui peningkatan mutu sumber daya, perbaikan teknologi, maupun efektivitas koordinasi dari faktor-faktor tersebut melalui penyempurnaan kelembagaan/organisasi sosial ekonomi di masing-masing wilayah.

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh sebab itu rencana aksi penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi ukuran penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar adalah sebagai berikut :

1. hak atas pangan.
2. hak atas layanan kesehatan.
3. hak atas layanan pendidikan.
4. hak atas pekerjaan dan berusaha.
5. hak atas perumahan.
6. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik.
7. hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
8. hak atas rasa aman.
9. hak untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, dalam menjalankan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, pemerintah berkewajiban untuk mengelola anggaran, menerbitkan peraturan dan melakukan tindakan (*obligation to conduct*) yang didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga menjamin pemenuhan hak dasar, tidak menciptakan hambatan dan beban bagi masyarakat miskin, dan tidak mematikan inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak

---

<sup>11</sup> Soetatwo Hadiwiguno dan Agus Pakpahan, *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia*, Prisma, Jakarta, 1993, hal 27.

<sup>12</sup> Sumedi Andono Mulyo, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Bappenas, Jakarta, 2005, hal. 4.

## **E. Hipotesis**

Dengan pertanyaan penelitian yang tersusun, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: "program pemberdayaan masyarakat Suku Kamoro berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mimika".

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah *explanatory survey* sebagai upaya mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan angket. Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar-variabel. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan tujuan dari metode survei adalah untuk menguji berbagai hipotesa tertentu dengan maksud membenarkan atau memperkuat hipotesa tersebut.

### **B. Operasionalisasi Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel pokok yaitu program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Variabel dalam penelitian yang dimaksud adalah satu variabel bebas yaitu program pemberdayaan masyarakat dan satu variabel terikat penanggulangan kemiskinan

Untuk mempermudah penganalisaannya, masing-masing variabel didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

#### **a. Program Pemberdayaan Masyarakat (X)**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kekuasaan. Adapun dimensi dan indikatornya adalah sebagai berikut:

- 1) Dimensi proses kegiatan untuk memperkuat keberdayaan masyarakat, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
    - (1) Kemampuan masyarakat mengidentifikasi masalah
    - (2) Kesiapan organisasi pelaksana program di lapangan
    - (3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
    - (4) Jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi program
    - (5) Jadwal waktu kegiatan pelaksanaan
    - (6) Berfungsinya pendampingan yang dilakukan oleh LSM/Perguruan Tinggi
    - (7) Tingkat pengembalian dana bergulir
  - 2) Dimensi tujuan/hasil yang ingin dicapai dari keberdayaan masyarakat, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
    - (1) Jumlah usulan yang dibiayai.
    - (2) Jumlah tenaga kerja penganggur yang dapat diserap.
    - (3) Meningkatnya aset usaha kecil.
    - (4) Persentase penyelesaian pekerjaan.
    - (5) Adanya peningkatan jumlah omset yang berputar.
    - (6) Peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran.
    - (7) Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat.
    - (8) Peningkatan prosentase sarana dan prasarana yang dibangun.
- b. Penanggulangan Kemiskinan (Y)
- Penanggulangan kemiskinan adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Adapun dimensi-dimensi dan indikator indikatornya adalah sebagai berikut :
- 1) Pemenuhan hak atas pangan, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
    - (1) Menurunnya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi tidak cukup untuk makan.
    - (2) Menurunnya jumlah balita kekurangan gizi.
    - (3) Meningkatnya ketahanan pangan.
  - 2) Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
    - (1) Tingkat kematian bayi dan balita.

- (2) Tingkat kematian ibu melahirkan.
- (3) Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.
- 3) Pemenuhan hak atas layanan pendidikan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - (1) Angka buta huruf pada penduduk miskin.
  - (2) Jumlah keluarga miskin yang mengikuti kursus keterampilan.
  - (3) Jumlah lembaga yang menyelenggarakan kursus keterampilan bagi orang miskin.
- 4) Pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
  - (1) Berkurangnya angka pengangguran terbuka.
  - (2) Berkembangnya usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
- 5) Pemenuhan hak atas perumahan, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
  - (1) Dihormatinya hak-hak masyarakat miskin untuk mengusahakan tempat tinggal yang layak.
  - (2) Berkembangnya sistem penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin.
- 6) Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi yang baik, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
  - (1) Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan aman.
  - (2) Menurunnya jumlah penduduk tanpa akses terhadap lingkungan yang sehat.
- 7) Pemenuhan hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
  - (1) Terwujudnya kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
  - (2) Meningkatnya kemampuan masyarakat miskin sekitar lokasi sumberdaya alam dalam memanfaatkan SDA dan LH secara lestari.
  - (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- 8) Pemenuhan hak atas rasa aman, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
  - (1) Berkurangnya konflik yang bersifat komunal, kekerasan yang bernuansa separatistis, dan kekerasan Negara.

- (2) Menurunnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
  - (3) Berkurang jumlah anak jalanan.
  - (4) Berkurangnya perdagangan anak dan perempuan.
- 9) Pemenuhan hak untuk berpartisipasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- (1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.
  - (2) Terbukanya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam berbagai perumusan kebijakan dan tahapan pembangunan.
  - (3) Tersedianya informasi mengenai rencana pembangunan, pelayanan publik, anggaran, dan perkembangan program pembangunan yang mudah diakses.

### C. Metode Penentuan Ukuran Populasi dan Sampel

Untuk menetapkan populasi dan ukuran sampel, maka terlebih dahulu perlu diketahui unit analisis dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat suku Kamoro yang memperoleh program tersebut. Karena pada subyek inilah akan dilakukan pengukuran tentang program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk menentukan jumlah populasi yang akan dijadikan sampel, digunakan rumus dari Machine dan Campbell<sup>13</sup> :

$$n = \frac{\left( Z \frac{1}{2} \alpha + Z \frac{1}{2} \beta \right)^2}{u_{\rho^2}} + 3$$

Berdasarkan rumus, maka ukuran sampel yang digunakan sebagai responden sebanyak 212 penduduk suku Kamoro Kabupaten Mimika.

<sup>13</sup> Harun Al Rasyid, *Statistik Sosial*, Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial, Institut Ilmu Pemerintahan, Bandung, 1994, hal. 15.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah kunjungan lapangan yang dilakukan dalam rangka memahami situasi dan mengamati situasi subyek dan obyek penelitian serta mengumpulkan data sekunder dari sumber yang diperlukan untuk pembahasan.

### **2. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mengadakan tinjauan dan kajian atas sejumlah buku, dokumen serta berbagai materi rujukan yang relevan dengan kebutuhan analisis.

### **3. Teknik Kuesioner**

Teknik kuesioner (penyebaran angket) ini adalah suatu cara pengajuan pernyataan/pertanyaan tertulis serta pilihan jawabannya kepada para responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner penelitian ini berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data primer (data yang langsung dari sumbernya). Penyusunan kuesioner penelitian dilakukan dengan menggunakan Teknik *Rating Scale*.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan terlebih dulu menguji validitas instrumen penelitian. Validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang diukur. Sehubungan dengan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, maka kuesioner yang disusun tersebut harus dapat teruji validitasnya. Selanjutnya melakukan uji reliabilitas instrumen penelitian. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Untuk membahas data yang diperoleh melalui proses kegiatan penelitian, penulis menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif adalah interpretasi dan pengukuran atas data-data hasil penelitian yang berwujud angka-angka atau bilangan tertentu.

## **F. Waktu dan Tempat**

Penelitian yang meliputi aktivitas observasi dan penyebaran angket (kuesioner) ini dilakukan di Kabupaten Mimika Propinsi Papua pada bulan Maret-Mei 2008.

## **III. Hasil Penelitian**

### **1. Gambaran Umum Suku Kamoro Kabupaten Mimika**

Sebagian besar Suku Kamoro tinggal di pinggir-pinggir pantai yang terdapat di pesisir selatan Kota Timika, Papua, seperti di Pulau Karaka. Kepiting bakau dan sagu merupakan panganan mereka sehari-hari. Pantai dan hutan bakau adalah kehidupan pesisir di Papua. Karena itu, pedalaman di wilayah Mimika Timur merupakan surga bagi ekosistem hutan bakau. Area ini digenangi oleh air pasang yang berasal dari Laut Arafuru. Tidak jauh dari tepian pantai terdapat permukiman Suku Kamoro, salah satu penduduk asli Kabupaten Mimika.

Kebanyakan masyarakat Suku Kamoro tinggal di rumah kayu nonpermanen. Kondisi ini cukup menggambarkan bahwa kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Namun saat ini ada beberapa Suku Kamoro bermukim di rumah permanen pemberian dari perusahaan tambang internasional yang beroperasi di Timika. Walau terseret arus modernisasi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari suku ini tetap menjalankan warisan tradisi seni ukir.

Dari tradisi seni ukir ini mereka dapat mengenal perjalanan hidup nenek moyang Suku Kamoro hingga akhirnya tinggal di Pesisir Selatan Kota Timika. Dari kisah tersebut mereka juga dapat mengetahui asal kata Kamoro yang memiliki arti manusia yang hidup. Sebagai sumber penghidupan, Suku Kamoro mengandalkan hasil laut. Kaum laki-laki bertugas membuat perahu guna mencari ikan. Sementara perempuan membikin sagu sebagai panganan mereka sehari-hari. Ini karena tidak mampu membeli beras. Apalagi mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Rata-rata Suku Kamoro hanya lulusan sekolah dasar dan tidak mampu bersekolah tinggi.

Bagi Suku Kamoro, para wanitalah biasanya mencari makan untuk keluarga di tengah hutan. Sementara anak serta menantu pria lebih berperan mengendarai dan menjaga perahu. Mereka harus mencari karaka sebelum

matahari terbenam. Sebab pada malam hari akan sulit mencari binatang di hutan bakau.

Kaum perempuan Suku Kamoro sangat piawai untuk mengetahui jejak persembunyian karaka. Di tengah pencarian karaka, Suku Kamoro gemar mengudap ulat pohon bakau atau disebut tambelo. Mereka kerap mencari di pohon bakau yang sudah tumbang dan melapuk. Bagi Suku Kamoro, tambelo merupakan sumber protein dan dapat menjaga tubuh mereka dari serangan nyamuk malaria. Tambelo yang layak untuk dimakan adalah berwarna putih bening serta tak terdapat kotoran kulit kayu di dalamnya.<sup>14</sup>

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap Suku Kamoro adalah untuk peningkatan pendapatan penduduk miskin. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Bimbingan teknis usaha kecil dan menengah; (2) Bimbingan konsultasi usaha kecil dan menengah; (3) pembuatan depo/warung produk usaha kecil dan menengah; (4) Pembuatan desain dan pengadaan produk usaha kecil dan menengah souvenir khas Mimika; (5) Diklat kewirausahaan dan manajemen bagi kelompok usaha kecil dan menengah; (6) pembinaan teknis Usaha Skala Mikro; (7) Pasar Rakyat; dan (8) Pembentukan Usaha Kecil sejenis.<sup>15</sup>

## 2. Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

Hal penting dalam melakukan penelitian masalah sosial adalah cara mendapatkan data informasi yang akurat dan objektif karena kesimpulan penelitian hanya akan dipercaya apabila didasarkan pada informasi yang juga dapat dipercaya. Untuk itu setiap item pertanyaan dari variable yang ingin diteliti harus diukur agar mampu memberikan informasi yang valid.

Butir instrumen yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa butir instrumen tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau  $r = 0,3$ . jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari  $0,3$  maka butir instrumen tersebut tidak valid.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 14.0, maka untuk variable pemberdayaan masyarakat diperoleh hasil uji sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Bappeda Kabupaten Mimika. *Profil Kabupaten Mimika*. 2006, hal 2-3.

<sup>15</sup> Laporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Kamoro dan Amungme. PMD Kabupaten Mimika, 2007.

Tabel 2.1  
 Hasil Uji Validitas Variabel Pemberdayaan masyarakat (X)

No Item Valid	Koefisien Korelasi	t hitung	t tabel	Keputusan
1	0.727	15.34322	1.96	Valid
2	0.566	9.949135	1.96	Valid
3	0.498	8.322067	1.96	Valid
4	0.683	13.5506	1.96	Valid
5	0.710	14.6107	1.96	Valid
6	0.506	8.501278	1.96	Valid
7	0.480	7.928999	1.96	Valid
8	0.448	7.261625	1.96	Valid
9	0.704	14.36487	1.96	Valid
10	0.757	16.78868	1.96	Valid
11	0.761	16.9987	1.96	Valid
12	0.697	14.08576	1.96	Valid
13	0.721	15.0783	1.96	Valid
14	0.779	18.00375	1.96	Valid
15	0.644	12.19887	1.96	Valid

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan valid untuk variable pemberdayaan masyarakat, karena nilai r korelasinya lebih besar dari nilai r kritis = 0.3. karena setiap nilai t hitungnya melebihi 1.96, maka semua item adalah valid.

Selanjutnya berdasarkan uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 14.0, maka untuk variable Penanggulangan Kemiskinan (Y) diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 2.2  
 Hasil Uji Validitas Variabel Penanggulangan Kemiskinan (Y)

No Item Valid	Koefisien Korelasi	t hitung	t tabel	Keputusan
1	0.697	14.08576	1.96	Valid
2	0.657	12.62893	1.96	Valid
3	0.661	12.76517	1.96	Valid
4	0.745	16.18446	1.96	Valid
5	0.382	5.989971	1.96	Valid
6	0.530	9.057136	1.96	Valid
7	0.652	12.46128	1.96	Valid
8	0.651	12.42809	1.96	Valid
9	0.618	11.3914	1.96	Valid
10	0.676	13.29373	1.96	Valid
11	0.584	10.42553	1.96	Valid
12	0.455	7.404424	1.96	Valid

No Item Valid	Koefisien Korelasi	t hitung	t tabel	Keputusan
13	0.380	5.953301	1.96	Valid
14	0.689	13.77634	1.96	Valid
15	0.659	12.69681	1.96	Valid
16	0.582	10.37149	1.96	Valid
17	0.679	13.40299	1.96	Valid
18	0.689	13.77634	1.96	Valid
19	0.743	16.0873	1.96	Valid
20	0.671	13.11433	1.96	Valid
21	0.782	18.18169	1.96	Valid
22	0.566	9.949135	1.96	Valid
23	0.342	5.274078	1.96	Valid
24	0.501	8.388934	1.96	Valid
25	0.412	6.552407	1.96	Valid

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan valid untuk variable penanggulangan kemiskinan, karena nilai r korelasinya lebih besar dari nilai r kritis = 0.3. karena setiap nilai t hitungnya melebihi 1.96, maka semua item adalah valid.

### 3. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliable*). Walaupun secara teoritis besarnya koefisien reliabilitas sekitar 0,00 s/d 1,00 akan tetapi pada kenyataannya koefisien sebesar 1,00 tidak pernah tercapai dalam pengukuran, karena manusia sebagai subjek penelitian merupakan sumber error yang potensial. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa :

Berdasarkan uji Reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 14.0, maka untuk variable Pemberdayaan masyarakat diperoleh hasil uji reliabilitas sebesar 0.789. Hasil uji reliabilitas variable-variabel tersebut menunjukkan reliabilitas hasil ukur yang tinggi. Hal ini berarti instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur dapat dipercaya.

Selanjutnya untuk variable Penanggulangan Kemiskinan diperoleh hasil uji reliabilitas sebesar 0.762. Hasil uji reliabilitas variable-variabel tersebut menunjukkan reliabilitas hasil ukur yang tinggi. Hal ini berarti instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur dapat dipercaya.

#### 4. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan statistik menunjukkan bahwa koefisien jalur antara pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan dijelaskan sebagai berikut :

- $H_0$  : Tidak ada hubungan linier antara pemberdayaan masyarakat dengan penanggulangan kemiskinan;
- $H_1$  : Ada hubungan linier antara pemberdayaan masyarakat dengan penanggulangan kemiskinan.

Dengan kriteria uji hipotesis sebagai berikut :

- Jika  $t$  penelitian  $>$   $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima
- Jika  $t$  penelitian  $<$   $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Atau membandingkan besarnya angka signifikansi ( $\text{sig}$ ) penelitian dengan taraf signifikansi sebesar 0,05, dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika  $\text{sig}$  penelitian  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima
- Jika  $\text{sig}$  penelitian  $>$  0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Setelah ditentukan hipotesis dan kriteria uji hipotesis, kemudian melihat besarnya angka  $t$  penelitian dari hasil penghitungan SPSS 14.0 sebesar 41,923  $>$   $t$  tabel sebesar 1,96. Selain itu dengan membandingkan angka signifikansi penelitian  $0,000 <$  0,05, maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada hubungan linier antara pemberdayaan masyarakat dengan penanggulangan kemiskinan. Besarnya koefisien korelasi antara pemberdayaan masyarakat dengan penanggulangan kemiskinan adalah 0,945. Adapun besarnya koefisien jalur adalah 0,945 atau 94,5 %.

Berikut disajikan rekapitulasi hasil perhitungan statistik pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.5  
Koefisien Korelasi, Jalur dan Determinasi antara  
Pemberdayaan masyarakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan

No	Koefisien	Notasi	Besar Koefisien
1	Koefisien Korelasi X dengan Y		0,945
2	Koefisien Jalur X terhadap Y		0,945
3	Koefisien Determinasi X terhadap Y		0,893
4	Koefisien Determinasi Variabel lain terhadap Y		0,107
5	Koefisien Jalur Variabel lain terhadap Y		0,327

Tabel di atas menunjukkan koefisien korelasi antara pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan sebesar 0,945. Hasil uji keberartian terhadap koefisien korelasi diperoleh nilai  $t_{hitung} = 41.923 > t_{tabel} = 1,96$ . sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan. Besar koefisien jalur  $P_{yx} = 0,945$ . Hal ini berarti pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan adalah sangat kuat (antara 0,90-1.00). Sedangkan koefisien determinasinya  $R^2_{yx} = 0,893$ . pengaruh faktor lain diluar pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 10,7 % (nilai kuadrat dari  $P_{x\hat{a}_1} = 0,327$ ), sedangkan koefisien jalur variabel lain diluar pemberdayaan masyarakat adalah 0,327.

#### IV. Pembahasan

Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS.14.0, maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, maka akan semakin membuat penanggulangan kemiskinan berhasil. Begitupun sebaliknya semakin buruk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, maka akan semakin membuat penanggulangan kemiskinan tidak berhasil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Sumodiningrat bahwa penyebab kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat, sehingga pemerintah perlu melakukan pemberdayaan masyarakat miskin. Secara umum, masyarakat miskin ditandai oleh ketidakberdayaan dalam hal: (1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar; (2) melakukan kegiatan usaha produktif; (3) menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi; (4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik; dan (5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.<sup>16</sup>

Banyak program pembangunan tidak mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dan bahkan gagal dalam mencapai program tersebut.<sup>17</sup> Hal tersebut berarti bahwa

---

<sup>16</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia Agenda Kini Dan Ke Depan*, Bappenas, Jakarta, 2003, hal 2.

<sup>17</sup> David C. Korten, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2001, hal 176.

banyak kebijakan pemerintah yang dihasilkan untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi sangat jarang yang dapat menyentuh substansi persoalan, khususnya kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Bertitik tolak dari kelemahan yang melekat pada strategi pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi, pada akhirnya muncul strategi pembangunan kualitas manusia atau *strategy of human approach*, strategi ini juga sering dikatakan *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada manusia atau kualitas manusia).

Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak berdaya sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak dari pandangan ini adalah pemerintah kemudian membuat program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memberi kontribusi dalam kapasitasnya sebagai subyek pembangunan. Dengan keberdayaan yang dimiliki masyarakat, maka diharapkan akan membuat masyarakat tersebut mampu merubah kondisi kehidupannya dari ketertinggalan ekonomi menuju peningkatan kesejahteraan mereka. Tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin karena tidak tepatnya program yang diberikan oleh pemerintah, menyebabkan masyarakat tidak dapat mencapai harkat martabat sebagai warganegara. Dalam berbagai kasus, terkooptasinya masyarakat miskin dari kehidupan sosial, membuat mereka semakin tidak berdaya untuk menyampaikan aspirasinya. Kasus tersebut terjadi sebagai akibat dari proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek dan mengabaikan keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu penyebab kegagalan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan di Mimika adalah lemahnya partisipasi masyarakat miskin (ketidakberdayaan) untuk dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dalam tahap perumusan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Berbagai item program pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin di Suku Kamoro. Pengambilan suatu keputusan erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin, untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan tersedianya ruang partisipasi dan kemampuan menyampaikan aspirasi berarti masyarakat berdaya dan akan dapat mempengaruhi keputusan yang

diambil agar sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk itu diperlukan perilaku birokrat yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriatna bahwa penanggulangan masyarakat miskin sangat ditentukan oleh kualitas perilaku birokrat yang responsive dalam membuat keputusan dan membina kelompok sasaran penduduk miskin.<sup>18</sup>

Selain itu kebiasaan masyarakat Suku Kamoro dalam menjalani kehidupan apa adanya membuat program pemberdayaan ini harus lebih didorong lagi, karena mereka umumnya apatis dalam merespon program yang ditawarkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi program sangat sedikit, padahal program pemberdayaan ini sudah seringkali disampaikan oleh Kepala Suku dan Kepala Kampung. Sosialisasi program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat mengatasi setiap permasalahan yang menjadi kendala dirinya untuk bangkit melawan ketertinggalan. Program ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap masyarakat Suku Kamoro.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan sebagai subyek dan aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Akan tetapi jika sebaliknya, upaya pengentasan kemiskinan hanya melibatkan masyarakat sebagai objek saja maka akan sulit menyentuh akar permasalahannya. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin.

---

<sup>18</sup> Tjahya Supriatna. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press. 2000, hal 182

Pendekatan hak-hak dasar relevan dengan perkembangan dan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Proses demokratisasi yang berlangsung selama ini telah membawa perubahan di berbagai bidang. Perubahan itu diharapkan mendorong terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sehingga pendekatan hak dasar akan sangat penting sebagai indikator dalam mengukur proses dan kinerja politik yang sedang berlangsung. Selain itu, dampak krisis ekonomi dan beban pembayaran utang telah mengurangi kemampuan anggaran negara. Pengakuan terhadap hak-hak dasar memberikan penegasan pentingnya investasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar, dan mempertajam prioritas alokasi anggaran negara bagi pembangunan manusia. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya perilaku birokrat yang menghormati dan memberi perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.<sup>19</sup>

Pendekatan berbasis hak (*right based approach*) berimplikasi pada perubahan cara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban aparatur birokrat, artinya bahwa aparatur birokrat berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif. Menghormati bermakna bahwa negara akan meratifikasi konvensi tentang hak-hak dasar dan menyusun peraturan perundangan yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak dasar, melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlindungi dan terpenuhinya hak-hak dasar, merumuskan kebijakan yang tidak melanggar hak-hak dasar, dan tidak turut serta dalam pelanggaran hak-hak dasar tersebut. Melindungi bermakna bahwa negara akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak dasar dari pelanggaran yang mungkin terjadi atau dilakukan oleh pihak ketiga. Memenuhi berarti bahwa negara akan menggunakan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, termasuk menggerakkan secara aktif sumberdaya dari masyarakat, swasta dan berbagai pihak.

Pemerintah melalui institusi terkait diharapkan mampu membentuk sistem yang dapat membantu orang-orang miskin dalam kehidupannya. Perilaku birokrat yang responsif terhadap permasalahan orang-orang miskin akan memudahkan dibuatnya kebijakan yang dapat mengatasi persoalan kemiskinan.

---

<sup>19</sup> Sumedi Andono Mulyo, *op.cit*, hal. 3

Perilaku birokrat yang responsif dapat memberi dorongan kepada masyarakat agar mempunyai kepedulian terhadap sesamanya.

Kondisi utama bagi terciptanya iklim yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat maupun kelembagaan pada kelompok masyarakat miskin adalah perilaku birokrat. Bagaimana suatu birokrat memandang kemiskinan dan cara mengatasi kemiskinan tersebut sangat menentukan tindakan-tindakan yang diambil dalam penanganan suatu program penanggulangan kemiskinan. Dengan kondisi administrasi birokrat yang lebih berorientasi pada kelompok sasaran ini, maka organisasi pembangunan akan lebih mampu menciptakan akses yang terbuka dan sama bagi setiap kelompok masyarakat miskin. Sosok birokrat yang tepat bagi pembangunan masyarakat miskin adalah birokrat harus dapat melaksanakan fungsi *empowering*, menciptakan iklim agar anggota-anggota masyarakat dapat mengembangkan berbagai potensinya, baik potensi sosial, intelektual, mental, spiritual, maupun fisiknya secara optimal; dan fungsi integrasi, agar proliferasi kelembagaan, diferensiasi struktural dan fungsional, tekanan penduduk terhadap sumber dan sebagainya tidak mempunyai efek disintegratif.<sup>20</sup>

Dengan demikian perilaku birokrat yang demikian harus mampu menumbuhkan *self sustaining capacity* dan menghilangkan *dependency creating* masyarakat, dengan secara terencana dan bertahap menyerahkan tanggung jawab dan kewenangan pembangunan kepada masyarakat untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Birokrat tidak lagi sebagai *governing* dalam rangka merealisasikan rencana pembangunan yang dirumuskan secara sentralistis, akan tetapi bertindak sebagai *facilitating*, yaitu menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan aspirasi masyarakat tumbuh dan berkembang.

Program pemberdayaan masyarakat miskin harus memperhatikan inisiatif dan partisipasi masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat akan lebih berhasil jika dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*. Untuk dapat melaksanakan pendekatan *bottom up* tersebut, maka perlu tersedia ruang publik yang dapat dijadikan arena partisipasi masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Tjahya Supriatna, *op. cit*, hal 208

<sup>21</sup> Rr.Suhartini, A. Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren. 2005, hal. 12

Ruang publik dapat dimaknai sebuah arena dimana masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dapat secara mandiri berpartisipasi dalam proses pengelolaan tata pemerintahan, baik pembuatan kebijakan maupun proses pemerintahan sehari-hari. Ruang publik seringkali dikaitkan dengan arena pembuatan kebijakan yang transparan, dimana masyarakat dapat hadir dan menggunakan hak bicara serta hak suara dalam proses tersebut. Pemaknaan atas ruang publik ini tidak hanya terbatas pada makna spasial (berkenaan dengan tempat), tetapi dapat juga berupa forum, pertemuan, maupun media lain yang memberikan peluang bagi publik (masyarakat) untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jadi pemberdayaan tidak dimulai dari proses pelaksanaannya saja, tapi pemberdayaan dimulai dengan menyusun program bersama-sama masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam kehidupannya.

## **G. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kebijakan pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya memberikan bantuan yang sifatnya *charity*, ataupun memberi modal. Kemiskinan tidaklah sesederhana itu sehingga dibutuhkan suatu kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan seluruh unsur bangsa dengan strategi pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat miskin menjadi subyek untuk menentukan nasibnya sendiri, atau dengan kata lain konsep utamanya adalah memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumber daya, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, pendamping, dan stimulator sehingga mereka mampu berkembang.

Pemberdayaan masyarakat dengan dimensi proses kegiatan untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dan tujuan/hasil yang ingin dicapai dari keberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat sangat menentukan penanggulangan kemiskinan. Artinya, semakin baik pemberdayaan masyarakat maka akan diikuti dengan semakin baiknya penanggulangan kemiskinan. Begitupun sebaliknya, semakin buruk

pemberdayaan masyarakat, maka akan diikuti dengan semakin buruknya penanggulangan kemiskinan. Konsep baru yang dapat diangkat dan dikembangkan dalam melengkapi dimensi-dimensi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat berhasil apabila didukung dengan pendekatan *bottom up* dengan memperhatikan inisiatif dan aspirasi dari masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat tidak dimulai pada tahap proses pelaksanaannya saja, tetapi juga dimulai pada tahap perencanaan program. Paradigma inilah yang disebut pemberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan aspiratif. Artinya, masyarakatlah yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi jalannya sebuah program pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

## **B. Rekomendasi**

Penelitian ini mengakui adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu penelitian menyarankan perlunya dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, agar di masa yang akan datang dapat terwujud pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya pemerintah perlu memperhatikan aspirasi yang berkembang dari bawah (masyarakat), melalui kebijakan memandirikan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Selain itu pemerintah perlu melakukan pelatihan terhadap masyarakat penerima manfaat dari program pemberdayaan masyarakat, guna mendorong dan meningkatkan aktivitas, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- David C. Korten, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Dokumen Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural*. Bappenas, Jakarta, 2000.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 2005, Refika Aditama, Bandung.
- Gunawan Sumodiningrat, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia Agenda Kini Dan Ke Depan*, Bappenas, 2003, Jakarta.
- Harun Al Rasyid, *Statistik Sosial*, Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial Pada Institut Ilmu Pemerintahan, Bandung 2004.
- Heru Nugroho, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Buku panduan "Kebijakan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan"*. Jakarta, 2005.
- Laporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Kamoro dan Amungme*, PMD Kabupaten Mimika, 2007.
- Moelyarto Tjokrowinoto, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*, PT. Tiara Wacana, 1993, Yogyakarta :
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Profil Kabupaten Mimika*, Bappeda Kabupaten Mimika, 2007.
- Rr Suhartini, A. Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren 2005, Yogyakarta
- Sriharini. 2007. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007, Yogyakarta.
- Sumedi Andono Mulyo, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Bappenas, Jakarta, 2005.
- Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, 2003, Aditya Media, Yogyakarta.
- Soetatwo Hadiwiguno dan Agus Pakpahan. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia*, Prisma, Jakarta, 2005.

Tjahya Supriatna, *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, 2000,  
Humaniora Utama Press, Bandung.

### **Undang-undang**

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 *Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi  
Papua.*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan  
Daerah.*